

Profil, Visi, Misi, dan
Program Kerja Calon
Ketua Umum dan
Wakil Ketua Umum
IKPI Periode 2024-
2029





Vaudy Starworld

Head Office :

World Trade Centre WTC 5,6th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920,
Indonesia.

Branch Office :

Bekasi :

ASERA Business District, Blok 1S-20 No. 23
Kota Harapan Indah, Bekasi

Manado:

Jl. Babe Palar No. 93
Manado, Sulawesi Utara

SERTIFIKASI PROFESIONAL:

- ✓ Konsultan Pajak Terdaftar Bersertifikat C
- ✓ Akuntan
- ✓ ASEAN - CPA
- ✓ Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak
- ✓ Ahli Kepabeanan
- ✓ Advokat
- ✓ Mediator sertifikasi Mahkamah Agung

ORGANISASI:

- ✓ Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
- ✓ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
- ✓ Perkumpulan Ahli Kepabeanan Indonesia (PERAKI)
- ✓ Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

KEPENGURUSAN:

- ✓ Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
 - ❑ Pengurus Pusat - Ketua Dept. Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) (2019 - 2024)
 - ❑ Pengurus Pusat - Anggota Pengembangan Organisasi (2014 - 2019)
 - ❑ Pengurus Cabang Bekasi (2010 - 2014)
- ✓ Perkumpulan Ahli Kepabeanan Indonesia (PERAKI) : Ketua Pengurus Harian (2021 - 2024)

KEGIATAN KEPANITIAAN DI IKPI:

- ✓ Wakil Ketua 2 Pengkaji Tim Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak (KEP-01/PP.IKPI/I/2024)
- ✓ Koordinator Seksi Dana & Sponsor Panitia Kongres XII IKPI di Bali (KEP-10/PP.IKPI/XII/2023)
- ✓ Wakil Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Kerja Nasional IKPI Tahun 2023 (KEP-02/PP.IKPI/II/2023)
- ✓ Seksi Humas & Undangan Panitia Natal Nasional IKPI 2023 (KEP-09/PP.IKPI/2023)
- ✓ Anggota Panitia AOTCA Meeting And Conference 2020 Bali (KEP-01/PP.IKPI/V/2022)
- ✓ Anggota Panitia Natal Bersama IKPI 2022 (KEP-07/PP.IKPI/XII/2022)
- ✓ Panitia Acara Gathering, HBH, Seminar & Rapat Anggota IKPI Cabang Bekasi (2022)
- ✓ Ketua Panitia HUT IKPI ke-57, Seminar Nasional, dan Fun Walk Tahun 2022
- ✓ Anggota Panitia Halal Bihalal Nasional IKPI 2021 (KEP-02/PP.IKPI/VI/2021)
- ✓ Anggota Perwakilan IKPI di KADIN (01/PP.IKPI/I/2020)
- ✓ Wakil Ketua Panitia Seminar Nasional Dalam Rangka Kerjasama IKPI Dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (KEP-02/PP.IKPI/III/2020)
- ✓ Anggota Tim Kode Etik dan Standar Profesi Tim Diseminasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Standar Profesi (KEP-03/PP.IKPI/II/2020)
- ✓ Wakil Ketua Panitia Natal Nasional IKPI 2019 (KEP 01/PP.IKPI/I/2019)
- ✓ Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL), Lokakarya, dan Seminar Yang Diselenggarakan IKPI (KEP-01/PP.IKPI/I/2018)
- ✓ Wakil Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Kerja Nasional IKPI Tahun 2018 (KEP-07/PP.IKPI/VII/2018)
- ✓ Panitia Kongres XI IKPI di Batu - Malang (2018)
- ✓ Wakil Ketua Panitia Seminar Nasional Perpajakan Dalam Rangka HUT Ke-53 IKPI (KEP-09/PP.IKPI/VII/2018)
- ✓ Wakil Ketua Panitia Seminar Nasional dan Silaturahmi Nasional 2018 (KEP-04/PP.IKPI/IV/2018)
- ✓ Wakil Ketua Panitia Seminar Nasional dan Silaturahmi Nasional 2017 (KEP-006/PP.IKPI/X/2017)
- ✓ Ketua Panitia Seminar Nasional dan Halal Bi Halal 2017 (KEP-004/PP.IKPI/V/2017)
- ✓ Panitia Pelatihan Penyusunan TP Doc dan Pemahaman Terhadap Sengketa TP Doc Cabang Bekasi (2017)
- ✓ Ketua Panitia Seminar Nasional dan Halal Bi Halal 2016 (KEP-002/PP.IKPI/VII/2016)
- ✓ Untuk Jabatan Sebagai Panitia Pengarah Tidak Dicantumkan Dalam Daftar In





JETTY, SE., MM

RIWAYAT PEKERJAAN :

- ✓ Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
- ✓ Pusat Analisa Informasi Keuangan Kementerian Keuangan
- ✓ Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri Kementerian Keuangan
- ✓ Kepala Bagian di Direktorat Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan - Kementerian Keuangan
- ✓ Kepala Seksi di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing III – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
- ✓ Kepala Bidang P2 Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus
- ✓ Kepala Bidang P2 Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat
- ✓ Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur
- ✓ Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara

KEGIATAN ORGANISASI:

- ✓ Sekretaris Umum IKPI
- ✓ Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bidang Organisasi
- ✓ Sekretaris Yayasan Pengembangan Penelitian Perpajakan Indonesia (YP3I) yang membawahi Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI)
- ✓ Pengurus Persatuan Pensiunan Kementerian Keuangan
- ✓ Pengurus Persatuan Para Pensiunan Pegawai Pajak (P5)

VISI

- 1. Menjaga Keluhuran Martabat Serta Meningkatkan Mutu Profesi Konsultan Pajak Dalam Rangka Pengabdiannya Kepada Bangsa Dan Negara;**
- 2. Mengawal Dan Mengupayakan Agar Pelaksanaan Undang-undang Perpajakan Dan Peraturan Perpajakan Berlaku Dengan Adil Dan Kepastian Hukum, dan**
- 3. Memupuk Dan Mempererat Rasa Persaudaraan Serta Rasa Kekeluargaan Antar Anggota Untuk Mewujudkan Persatuan Dan Kesatuan Anggota**

Sumber: Pasal 7 Anggaran Dasar IKPI : Tujuan Perkumpulan

Misi :
MAJU BERSAMA IKPI

Mengandung makna:

"IKPI MAJU dan ANGGOTA MAJU"

**KEMAJUAN BUKAN HANYA IKPI SECARA
ORGANISASI SAJA TETAPI IKPI SECARA
ORGANISASI HARUS MEMAJUKAN
ANGGOTANYA JUGA**



PROGRAM KERJA PRIORITAS

BAGI ORGANISASI

1. Menjadikan IKPI Sebagai Sumber Referensi Dalam Menyusun Kebijakan Perpajakan Di Indonesia
2. Menjadikan IKPI Sebagai Pusat Informasi Perpajakan Di Indonesia
3. Meningkatkan Sinergi Antara IKPI Dengan Pemangku Kepentingan
4. Memperluas Jaringan Dan Kemitraan IKPI
5. Membangun Struktur Keuangan IKPI
6. Pengembangan Organisasi IKPI
7. Mengoptimalkan Peran Tim Sekretariat IKPI dalam melayani kebutuhan Anggota dan Mendukung Program Kerja Pengurus Pusat

BAGI ANGGOTA

1. Terwujudnya Undang-undang Konsultan Pajak
2. Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Anggota IKPI
3. Memenuhi Kebutuhan Anggota Dalam Berpraktek
4. Mendorong Anggota IKPI untuk Tampil pada Pentas Nasional dan internasional
5. Meningkatkan Kesejahteraan Anggota
6. Mengupayakan Tindakan preventif dan bantuan hukum bagi Anggota IKPI
7. Mengoptimalkan peran anggota dalam pengembangan IKPI

Menjadikan IKPI Sebagai Sumber Referensi Dalam Menyusun Kebijakan Perpajakan Di Indonesia

Dengan anggota lebih dari 6000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, dan masing-masing anggota memiliki klien yang beragam dari berbagai sektor usaha, menjadikan anggota IKPI memahami permasalahan perpajakan dari berbagai sektor usaha sehingga dapat memberikan masukan-masukan ke pemerintah.

Menjadikan IKPI sangat layak sebagai sumber informasi dalam Menyusun kebijakan perpajakan di Indonesia.

KEGIATAN :

1. Aktif menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan anggota IKPI se-Indonesia dan dunia usaha serta stakeholder lainnya.
2. Menyelenggarakan penelitian yang bersifat Nasional mengenai kebijakan perpajakan dengan melibatkan pihak lain

Produk akhir: Memberikan masukan ke Pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan

Menjadikan IKPI Sebagai Pusat Informasi Perpajakan Di Indonesia

Anggota IKPI sangat potensial dalam berbagi ilmu terutama bidang perpajakan, akuntansi, dan hukum pajak, dan dengan anggota lebih dari 6000 orang yang berpengalaman sebagai Konsultan Pajak dapat menjadikan IKPI sebagai pusat informasi perpajakan bagi Wajib Pajak.

Dengan website dan media sosial yang dimiliki saat ini IKPI dapat memberikan kesempatan kepada anggota untuk menulis artikel dan menyampaikan pendapat mengenai perkembangan perpajakan di Indonesia. Dengan demikian IKPI menjadi pusat informasi perpajakan di Indonesia.

KEGIATAN :

1. Menjadikan website dan media sosial IKPI sebagai media menyediakan informasi dan peraturan perpajakan secara gratis bagi anggota IKPI.
2. Tersedianya video-video pembelajaran perpajakan secara singkat dengan sumber informasi dari Anggota IKPI

Mendorong Sinergi Antara IKPI dengan Pemangku Kepentingan

- Pemerintah**
Membangun hubungan kolaboratif yang erat dengan institusi pemerintah, antara lain Direktorat Jenderal Pajak, Pengadilan Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, Komisi Pengawas Perpajakan untuk menyerap masukan dan mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada sektor perpajakan dan profesi Konsultan Pajak sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam rangka peningkatan penerimaan negara dan edukasi perpajakan bagi Wajib Pajak.
- Perguruan Tinggi**
Meningkatkan kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi, baik dalam bentuk riset bersama, program pengembangan kurikulum, maupun pertukaran pengetahuan, untuk mencetak lulusan perguruan tinggi yang siap berkontribusi dalam dunia perpajakan.
- Dunia Usaha/Asosiasi Pengusaha**
Memperkuat kemitraan strategis dengan asosiasi pengusaha dalam rangka sosialisasi peraturan perpajakan, proses bisnis pada industri tertentu, maupun kegiatan yang bertujuan menyampaikan perpajakan pada dunia usaha, serta mengenalkan IKPI dan anggota IKPI kepada asosiasi pengusaha.
- Organisasi Profesi**
Membangun jembatan kerjasama dengan organisasi-organisasi profesi penunjang sektor keuangan, seperti Akuntan Publik, Akuntan Berpraktik, Aktuaris, Penilai Publik, Notaris, konsultan hukum, ahli syariah jasa keuangan, dan profesi lain.

Mendorong Sinergi Antara IKPI dengan Pemangku Kepentingan (1)

■ Pemerintah

Membangun hubungan kolaboratif yang erat dengan institusi pemerintah, antara lain Direktorat Jenderal Pajak, Pengadilan Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, Komisi Pengawas Perpajakan, P2PK, untuk memberikan masukan dan mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada sektor perpajakan dan profesi Konsultan Pajak sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam rangka peningkatan penerimaan negara dan edukasi perpajakan bagi Wajib Pajak.

Kegiatan ini akan diselenggarakan secara koordinasi dengan Pengda dan Pengcab dan bersifat nasional.

KEGIATAN :

1. Menyelenggarakan kegiatan FGD bersama pemerintah untuk memberikan gambaran sekaligus masukan yang menyeluruh kepada pemerintah.
2. Menyelenggarakan kegiatan bersama dengan untuk menjalin hubungan yang harmonis seperti dalam bidang olahraga
3. Menyelenggarakan pertemuan baik formal maupun informal secara rutin dan terjadwal baik di tingkat pusat, daerah, maupun cabang, baik dengan Pemerintah Pusat maupun di Kanwil, dan Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan masukan-masukan ke pemerintah dan IKPI.
4. Rutin dan terjadwal mengadakan sosialisasi peraturan dan perkembangan sektor perpajakan

Mendorong Sinergi Antara IKPI dengan Pemangku Kepentingan (2)

■ Perguruan Tinggi

Meningkatkan kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi, baik dalam bentuk riset bersama, program pengembangan kurikulum, maupun pertukaran pengetahuan, untuk mencetak lulusan perguruan tinggi yang siap berkontribusi dalam dunia perpajakan.

KEGIATAN :

1. Melakukan Kerjasama dengan perguruan tinggi baik strata 1 maupun strata 2 dengan tujuan meningkatkan kompetensi anggota IKPI
2. Mengundang pengajar perguruan tinggi memberikan materi-materi yang relevan dengan profesi Konsultan Pajak.
3. Kuliah umum secara terjadwal di perguruan tinggi yang telah ada MOU dengan narasumber diutamakan dari Pengda/Pengcab atau anggota IKPI setempat
4. Melakukan riset bersama dalam rangka pengembangan kurikulum perpajakan dan perkembangan perpajakan di Indonesia

Mendorong Sinergi Antara IKPI dengan Pemangku Kepentingan (3)

■ Dunia Usaha/Asosiasi Pengusaha

Memperkuat kemitraan strategis dengan asosiasi pengusaha dalam rangka sosialisasi peraturan perpajakan, proses bisnis pada industri tertentu, maupun kegiatan yang bertujuan menyampaikan perpajakan pada dunia usaha, sehingga IKPI anggota IKPI lebih dikenal di dunia bisnis.

KEGIATAN :

1. Mengadakan sosialisasi perpajakan kepada asosiasi pengusaha, perbankan, dan pelaku usaha lainnya.
2. Mengundang asosiasi pengusaha menjadi narasumber di IKPI untuk memberikan gambaran mengenai proses bisnis industri tertentu
3. Melakukan kegiatan bersama seperti olahraga, gala dinner, business forum dll dengan tujuan mengenalkan IKPI dan anggota IKPI sehingga dapat menciptakan Kerjasama bisnis antara anggota IKPI dengan pengusaha

Mendorong Sinergi Antara IKPI dengan Pemangku Kepentingan (4)

- Organisasi Profesi
Membangun jembatan kerjasama dengan organisasi-organisasi profesi penunjang sektor keuangan, seperti Akuntan Publik, Akuntan Berpraktik, Aktuaris, Penilai Publik, Notaris, konsultan hukum, ahli syariah jasa keuangan, dan profesi lain.

KEGIATAN :

1. Mengadakan sosialisasi perpajakan kepada asosiasi profesi penunjang sektor keuangan.
2. Mengundang asosiasi profesi penunjang sektor keuangan menjadi narasumber di IKPI untuk memberikan materi yang relevan bagi Konsultan Pajak
3. Melakukan kegiatan bersama seperti olahraga dengan tujuan mengenalkan IKPI dan anggota IKPI sehingga dapat menciptakan Kerjasama bisnis antara anggota IKPI dengan anggota asosiasi profesi penunjang sektor keuangan

Kegiatan seperti ini juga dilaksanakan dengan asosiasi lainnya di luar asosiasi profesi penunjang sektor keuangan

Memperluas Jaringan dan Kemitraan IKPI

IKPI berkomitmen untuk memperluas jaringan dan kemitraan di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas, kredibilitas, dan pengaruh IKPI di kancah profesional yang lebih luas.

Dengan menjalin kerja sama strategis dengan organisasi sejenis, asosiasi profesi, serta lembaga pemerintah dan swasta, IKPI dapat saling berbagi pengetahuan, sumber daya, dan peluang yang saling menguntungkan.

KEGIATAN :

1. Melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti:
 - a. Rumah sakit
 - b. Layanan Kesehatan Non Rumah Sakit
 - c. Olahraga
 - d. Toko Buku
 - e. BioskopDengan tujuan mendapatkan potongan harga atau fasilitas tertentu bagi anggota IKPI
2. Melakukan kerjasama dan webinar gratis dengan organisasi konsultan pajak di luar AOTCA dalam rangka pertukaran informasi peraturan perpajakan dan lainnya
3. Melakukan kerjasama dengan KPK, POLRI dan lainnya dalam rangka tindakan preventif anggota IKPI akibat permasalahan perpajakan termasuk dengan klien

Membangun Struktur Keuangan IKPI

Saat ini keuangan IKPI lebih bersumber pada penerimaan dari kegiatan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) dan iuran anggota, tentu hal ini sudah sangat baik karena IKPI dapat membiayai sendiri kegiatan dari penerimaan internal.

Namun dalam kepemimpinan kami, struktur ini akan bergeser ke sumber penerimaan dari luar anggota sehingga IKPI akan lebih leluasa untuk mengadakan kegiatan-kegiatannya.

Hal ini tentu melihat jumlah Wajib Pajak di Indonesia yang besar sehingga ini merupakan pasar yang cukup besar dan sangat potensial menjadi sumber penerimaan

KEGIATAN :

1. Memperluas kerjasama dengan entitas bisnis dalam mengadakan pendidikan antara lain inhouse training.
2. Mengadakan seminar-seminar berbayar dengan peserta di luar anggota IKPI atau Wajib Pajak secara umum
3. Melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan seminar berbayar dengan asosiasi pengusaha maupun industri.
4. Optimalkan penyelenggaraan Brevet oleh Pengcab dan Perguruan Tinggi

Pengembangan Organisasi

KEGIATAN :

1. Membentuk Tim Audit dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan dan peningkatan kualitas laporan keuangan
2. Menyampaikan annual report kepada anggota IKPI yang berisi kegiatan-kegiatan IKPI, laporan pelaksanaan program, dan laporan keuangan
3. Mengevaluasi kembali dan meredesain ulang departemen yang ada pada periode 2019 – 2024 sehingga memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai visi, misi, dan program kerja 2024 - 2029
4. Membuka saluran komunikasi di luar rakernas dan mukernas dengan Pengda/Pengcab dalam upaya membangun komunikasi sesama pengurus
5. Melakukan kunjungan ke Cabang-cabang dengan tujuan untuk mendengarkan masukan dari Pengurus Cabang dan anggota (biaya ditanggung dari kas Pengurus Pusat)
6. Membentuk Forum Komunikasi yang beranggota “PARA MANTAN”: Ketua Umum, Ketua Pengawas, Ketua Pengurus Daerah, dan Ketua Pengurus Cabang (yang tidak menjabat dalam kepengurusan saat ini) dengan tujuan dalam memberikan masukan kepada Ketua Umum
11. Memberikan bantuan dana operasional kepada Pengurus Cabang untuk kegiatan-kegiatan yang berasal dari program Pengurus Pusat
6. Menambah prosentase bagi hasil ke cabang atas kegiatan PPL online
7. Memperkuat Pengurus Daerah sebagai bagian dari Pengurus Pusat dan sebagai Koordinator kegiatan Pengcab.
8. Mendukung cabang-cabang memiliki kantor sendiri dengan sumber pembiayaan dari cabang dan pusat sehingga kemandirian cabang dapat tercapai

Pengembangan Organisasi (2)

9. Menyusun Roadmap Profesi Konsultan Pajak menuju Indonesia Emas 2045
10. Me-redesign kegiatan Brevet yang dilakukan oleh Pengurus Cabang
11. Melakukan evaluasi dan perbaikan atas MOU yang sudah ada antara IKPI dengan Perguruan Tinggi dengan semangat dan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak, serta meningkatkan peran IKPI dalam menjalankan hubungan dengan perguruan tinggi
12. Realisasi PPL secara real time
13. Meningkatkan peran dan kontribusi Anggota Kehormatan (Dewan Penasihat) serta menjadikan Dewan Penasihat sebagai duta dalam bersuara menyangkut kepentingan IKPI termasuk RUU KP
14. Mendirikan asosiasi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak
16. Membuka ruang diskusi antar anggota mengenai permasalahan yang dihadapi dalam berpraktek
16. Menjalni komunikasi dengan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (eselon 1, 2, dan 3) yang akan memasuki masa pensiun dengan tujuan suatu saat menjadi anggota IKPI
17. Meningkatkan kerjasama dengan Pengawas sebagai salah satu Organ Perkumpulan dengan menjadi partner dalam menegakkan fungsi pengendalian dan transparansi sehingga visi, misi, dan program kerja dapat tercapai
18. Menambah kerjasama antara IKPI dengan Perguruan Tinggi dengan semangat dan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak, serta meningkatkan peran IKPI dalam menjalankan hubungan dengan perguruan tinggi
19. Melakukan kerjasama yang erat (mitra) antar Organ Perkumpulan lainnya yaitu Dewan Penasihat dan Dewan Kehormatan demi tercapainya tujuan organisasi.

Mengoptimalkan Tim Sekretariat IKPI dalam melayani kebutuhan Anggota dan Mendukung Program Kerja Pengurus Pusat

Kepengurusan Periode 2024 – 2029 ini akan menggeser peranan Pengurus Pusat dari sangat dominan dengan pekerjaan teknis menjadi pengambil keputusan strategis dan monitor pelaksanaan program.

Pekerjaan teknis akan menjadi tugas Tim Sekretariat IKPI sehingga Sekretariat IKPI harus dioptimalkan peran dan sumber daya manusianya.

KEGIATAN :

1. Merealisasikan jabatan Direktur Eksekutif (bilamana sampai Kongres 2024 belum ada)
2. Melakukan evaluasi tugas, tanggungjawab, dan struktur, personal Sekretariat IKPI saat ini dengan tujuan meningkatkan peranan Sekretariat IKPI dalam pelayanan administrasi
3. Menjadikan Sekretariat IKPI sebagai sumber informasi kegiatan-kegiatan IKPI



Terwujudnya Undang-undang Konsultan Pajak

Tahun 2018 DPR RI telah menetapkan Rancangan Undang-undang Konsultan Pajak (RUU – KP) menjadi usulan DPR. RUU KP pernah masuk pada Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada tahun 2019. Saat ini RUU KP masuk pada Daftar Prolegnas 2020 – 2024.

RUU KP dirasakan sangat penting karena KP merupakan profesi yang ada sesuai UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSP), juga untuk melindungi Wajib Pajak dari praktek-praktek pihak-pihak yang tidak memahami perpajakan, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam menjaga penerimaan negara.

KEGIATAN :

1. Mengadakan audiensi dengan Pemerintah (Kemenkeu, DJP, P2PK), BPK, dan DPR mengenai perkembangan dan kebutuhan RUU KP
2. Mengadakan FGD dengan Stakeholder (Pemerintah/Kemenkeu/DJP/P2PK, Pengusaha, Konsultan Pajak, Akademisi, DPR, BPK)
3. Melibatkan Anggota IKPI mengenai pokok-pokok RUU KP melalui usulan-usulan
4. Menguatkan Tim RUU KP yang telah terbentuk
5. Diskusi dengan Profesi Penunjang Sektor Keuangan mengenai perjalanan terbentuknya UU mereka
6. Mengoptimalkan peran Anggota Kehormatan (Dewan Penasihat) dalam melakukan lobby-lobby politik
7. Melibatkan akademisi dalam rangka penyempurnaan RUU Konsultan Pajak

Terwujudnya Undang-undang Konsultan Pajak (2)

Sebelum terwujudnya Undang-undang Konsultan Pajak, perlu ada upaya dari IKPI kepada regulator untuk mendorong pengaturan mengenai Kuasa Wajib Pajak Non Konsultan Pajak.

KEGIATAN :

1. Mengadakan audiensi dengan Pemerintah serta memberikan kajian-kajian mengenai perlu dan mendorong pengaturan lebih lanjut mengenai Kuasa Wajib Pajak Konsultan Pajak maupun Non Konsultan Pajak
2. Mengusulkan ke regulator untuk membuka Kembali pendaftaran Konsultan Pajak yang tidak terdaftar saat berlakunya PMK 111/PMK.03/2014

Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Anggota IKPI

Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL)

Meningkatkan PPL IKPI dengan instruktur dan materi yang baru, update, dan memenuhi kebutuhan anggota dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota IKPI terkait profesi konsultan pajak.

IKPI Menjadi Fasilitator Bagi Anggota

Menjadi fasilitator bagi anggota IKPI pada kegiatan-kegiatan Pendidikan formal maupun nonformal sehingga kualitas dan kompetensi anggota terus meningkat

Sertifikasi Program

Mengadakan program sertifikasi profesi untuk memberikan pengakuan kompetensi yang dimiliki anggota IKPI, sehingga meningkatkan kredibilitas dan daya saing anggota.

Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Anggota IKPI (1)

Pengembangan Profesional Berkelanjutan

Meningkatkan PPL IKPI dengan instruktur dan materi yang baru, update, dan memenuhi kebutuhan anggota dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota IKPI terkait profesi konsultan pajak.

KEGIATAN :

1. Mengadakan PPL Terstruktur dengan sistem e-learning supaya Anggota IKPI dapat mengikuti PPL dengan jangka waktu tertentu sehingga anggota mempunyai waktu yang lebih fleksibel.
2. Mempertahankan PPL NTS Softskill dan pelaksanaannya secara gratis.
3. Sosialisasi perpajakan dengan narasumber negara-negara AOTCA secara gratis
4. Meningkatkan jumlah sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk anggota IKPI
5. Memperbanyak organisasi sektor usaha memberikan materi dalam bentuk sosialisasi mengenai proses bisnis sehingga dapat menambah wawasan anggota IKPI

Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Anggota IKPI (2)

IKPI Menjadi Fasilitator

Menjadi fasilitator bagi anggota IKPI pada kegiatan-kegiatan Pendidikan formal maupun nonformal sehingga kualitas dan kompetensi anggota terus meningkat

KEGIATAN :

1. Memfasilitasi anggota IKPI yang berminat kuliah S1 maupun S2 Hukum/Akuntansi
2. Memfasilitasi anggota IKPI yang berminat mengambil Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
3. IKPI menjadi fasilitator dalam pengembangan anggota, seperti bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membuat kelas Mediator, Kurator, dan lainnya sepanjang meningkatkan sumber daya anggota IKPI
4. Meningkatkan peran anggota dalam menulis di web IKPI sehingga artikel lebih bervariasi dengan penulis dari anggota sendiri

Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Anggota IKPI (3)

Sertifikasi Program

Membuat program sertifikasi profesi untuk memberikan pengakuan kompetensi pada bidang tertentu yang dimiliki anggota IKPI, sehingga meningkatkan kredibilitas dan daya saing.

KEGIATAN :

1. Sertifikasi Pendidikan Pajak Internasional
2. Sertifikasi Pendidikan Transfer Pricing
3. Sertifikasi Pendidikan Akuntansi Perpajakan
4. Sertifikasi program PPL NTS (softskill) untuk pengembangan anggota
5. Kegiatan lainnya yang bersertifikasi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi anggota IKPI dengan mengacu pada jasa yang diberikan Konsultan Pajak

Memenuhi Kebutuhan Anggota Dalam Berpraktek Sebagai Konsultan Pajak

IKPI sebagai wadah berkumpul dari anggotanya harus mampu memenuhi kebutuhan dasar dari anggota dalam menjalankan profesinya. Kebutuhan dasar ini dapat berupa pengetahuan, ketrampilan, maupun kelengkapan berpraktek sehingga kebutuhan minimal untuk menjadi Konsultan Pajak dapat terpenuhi

KEGIATAN :

1. Pembekalan bagi anggota baru untuk mengenalkan profesi Konsultan Pajak dan organisasi IKPI
2. Menyiapkan kantor konsultan pendamping bagi anggota IKPI yang baru lulus USKP atau penyetaraan ijazah konsultan pajak bagi pensiunan (sistem mentor)
3. Membuat Surat Ikatan Tugas (SIT) beserta pelatihan membuat legal drafter sehingga anggota IKPI mampu membuat perjanjian dengan klien dalam berpraktek.
4. Membuat Kertas Kerja Compliance beserta pelatihannya, dengan tujuan anggota IKPI mampu mempertanggungjawabkan pekerjaan compliance yang dibuat
5. Sosialisasi topik-topik khusus yang berhubungan dengan standar profesi konsultan pajak seperti Pengisian SPT Tahunan, resiko profesi konsultan pajak, dan lainnya. Pelaksanaan secara gratis

Mendorong Anggota IKPI untuk Tampil Pada Pentas Nasional Dan Internasional

Anggota tersebar di seluruh Indonesia (bukan hanya berdomisili di Pengda DKI dan Banten saja) , dengan potensi, kelebihan, dan kemampuannya masing-masing sehingga IKPI sebagai organisasi harus mampu mendorong anggotanya di seluruh Indonesia untuk tampil secara nasional bahkan di kancah internasional.

IKPI akan bekerjasama dengan asosiasi konsultan pajak di luar Indonesia bahkan pengenalkan perpajakan kepada asosiasi tersebut sehingga sangat diperlukan narasumber dari anggota IKPI sendiri

KEGIATAN :

1. Mendorong anggota IKPI menjadi pembicara pada sosialisasi yang diadakan bagi Non Konsultan Pajak secara nasional, wilayah, maupun cabang.
2. Mendorong anggota IKPI menjadi pembicara pada kegiatan internasional
3. Mendorong anggota IKPI tampil dalam forum bisnis dalam memenuhi permintaan pihak eksternal
4. Mendukung penuh Bpk. Ruston Tambunan menjadi Presiden AOTCA tahun 2025.
5. Mempertahankan Bpk. Ruston Tambunan di kepengurusan KADIN Indonesia saat ini
6. Mengajak dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Anggota IKPI berbagi ilmu dalam bidang perpajakan, akuntansi, dan hukum pajak melalui website dan media sosial IKPI.



Meningkatkan Kesejahteraan Anggota IKPI

IKPI harus menyadari ekonomi anggotanya tidak merata bahkan penyebaran klien juga tidak merata sehingga sangat perlu memperhatikan kesejahteraan dan perekonomian anggotanya.

Di samping itu ada anggota IKPI dalam menunjang perekonomiannya mempunyai bisnis lain di luar profesi konsultan pajak, untuk meningkatkan usaha anggota IKPI juga dapat berperan di dalamnya

KEGIATAN :

1. Penyesuaian harga PPL Terstruktur (TS) berupa potongan harga
2. Memberikan potongan harga PPL TS bagi anggota yang tidak mampu dengan syarat dan kondisi yang berlaku
3. Memberikan tambahan potongan harga PPL TS bagi anggota yang telah berumur lebih dari 70 tahun
4. Membuat program bonus mengikuti PPL TS gratis bagi anggota yang telah mencapai SKP TS tertentu dalam satu tahun.
5. Melakukan Kerjasama dengan anggota yang mempunyai bisnis yang dapat menunjang profesi konsultan pajak atau kegiatan-kegiatan IKPI
6. Mempertemukan anggota IKPI dengan anggota profesi lainnya termasuk Wajib Pajak dan asosiasi pengusaha sehingga terjalin hubungan bisnis.
7. Mempublikasikan anggota IKPI (khusus anggota yang setuju kantornya dipublikasikan) dengan tujuan dapat dikenal oleh Wajib Pajak maupun calon pengguna jasa.
8. Memberikan santunan duka berupa uang tunai kepada anggota IKPI yang meninggal dunia
9. Menyiapkan konsultan pajak pendamping bagi klien-klien anggota IKPI yang meninggal dunia



Mengupayakan Tindakan preventif dan bantuan hukum bagi Anggota IKPI

Tidak dapat dipungkiri profesi Konsultan Pajak rawan dipidanakan oleh pihak lain baik oleh klien maupun pihak lainnya. Untuk mencegah hal tersebut dipandang sangat penting dan perlu melakukan preventif sebagai upaya pencegahan anggota bermasalah dengan hukum.

IKPI juga sesuai dengan amanat AD/ART dapat memberikan bantuan hukum bagi anggota IKPI yang membutuhkan bantuan hukum

KEGIATAN :

1. Membentuk tim bantuan hukum
2. Melakukan sosialisasi dengan topik-topik khusus dengan tujuan sebagai upaya preventif untuk mencegah anggota bermasalah dengan hukum
3. Menyiapkan bantuan hukum bagi anggota IKPI yang bermasalah dengan hukum akibat menjalankan profesi konsultan pajak, sepanjang anggota tersebut dalam berpraktek telah melaksanakan Kode Etik dan Standar Profesi.

Mengoptimalkan peran anggota dalam pengembangan IKPI

Tidak dapat dipungkiri saat ini usulan-usulan atau evaluasi anggota tidak sampai ke Pengurus Pusat, atau bilamana sampai ke Pengurus Pusat namun tidak ditindaklanjuti.

Program prioritas kami adalah mendengarkan suara anggota bahkan mengoptimalkan peran anggota dalam mengembangkan IKPI

KEGIATAN :

1. Mendorong anggota aktif dalam FGD
2. Mendorong anggota menjadi pembicara pada Seminar dan Sosialisasi yang diadakan khusus untuk Non Anggota IKPI atau Wajib Pajak
3. Mendorong anggota berperan dalam Tim bentukan Pengurus Pusat
4. Membuka saluran komunikasi dengan anggota IKPI langsung ke Pengurus Pusat untuk mendengarkan masukan-masukan dan menjadi evaluasi program dengan menggunakan aplikasi/website

Kerjasama antara Anggota dengan Pengurus IKPI sangat dibutuhkan dalam menjalankan program prioritas ini sehingga Visi, Misi, dan Program Kerja IKPI 2024 – 2029 dapat tercapai.

Prinsip semangat membangun dan memajukan IKPI dalam kebersamaan menjadi dasar kami.



TERIMA KASIH

